



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NESTOR JONO

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : 724616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.184.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m²/228 m² di KAB / KOTA

MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

2. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI

Rp. 159.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA

KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 416.150.000

1. MOBIL, HONDA CR-VRE12WD24ATCKD Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. MOBIL, HONDA HR-VRU11.5SCVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 2BU Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.650.000

4. MOTOR, KAWASAKI KR150K Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

5. MOTOR, HONDA T4G02T31LO M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. 1.692.650.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.692.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.